

# PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KOTA SABANG ACEH

**Edy Putra Kelana**

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas AlMuslim

## ABSTRAK

*Sistem pemilihan umum legislatif secara langsung tahun 2014 membuka maraknya praktik money politic di Kota Sabang dengan mengatasnamakan Shadaqah, hadiah, hibah dan lain sebagainya. Dalam situasi yang serba sulit saat ini, uang merupakan alat kampanye yang cukup ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon legislatif tertentu. Kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon legislatif, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu penangangan dalam pemilu. Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan mengatakan bahwa money politic itu haram, penilai beberapa agamawan yang lain tidak se ekstrem itu. Menteri Agama, seperti yang dikutip oleh Ismawan dalam money politics Pengaruh Uang dalam Pemilu, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik money politics haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil yang jelas berkaitan langsung dengan persoalan tersebut. Akhirnya, sulit dibedakan antara pemberian yang tergolong risywah (suap) dan pemberian yang tergolong amal jariyah. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab maraknya money politics di Sabang yang masyarakatnya tergolong agamis.*

**Kata Kunci:** Money Politik

## PENDAHULUAN

Pada proses demokrasi level akar rumput (*grass root*), praktek *money politics* tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajiban, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money* secara normatif harus dijauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi *money politics*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Budaya *money politic* merupakan hal lumrah dalam masyarakat Jawa. Fenomena *money politics* dalam masyarakat Jawa bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan kepala desa atau lurah sebagai komponen terkecil dari pemerintah Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik *money politics* telah melibatkan hampir seluruh elemen sosial seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, saudagar bahkan kalangan agamawan sekalipun.

Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politis ini dipahami

sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang.

Perilaku *money politics*, dalam konteks politik sekarang, seringkali di atasnamakan sebagai bantuan, infaq, shadaqah dan lain-lain. Pergeseran istilah *money politics* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behavior*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuasa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan.

Melihat kenyataan bahwa praktik *money politics* telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakkan hukum (*Supremacy*) di Inonesia. *Money politics* membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampakkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang *fair*. Pemilu seperti ini akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat.

Namun, demikian, masyarakat tetap tidak bisa memberikan justifikasi hukum terhadap semua pemberian politis sebagai risywah. Karena ketetapan hukum atas pemberian politis sebagai risywah. Karena ketetapan hukum atas pemberian politis ini harus melalui proses interpretasi berupa upaya pemahaman secara mendalam terhadap makna kepentingan yang sesungguhnya dibalik perilaku politik (*political behavior*) terlebih dahulu, sehingga publik dapat mengetahui alasan ('illat) yang mendasari suatu tindakan atau bantuan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam kaidah ushul fiqih "al-hukmu yaduru ma'a lillatini wujudan wa adaman". Berangkat dari latang belakang pemikiran inilah peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai tema diatas dengan mengambil lokasi di Sabang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian sosial untuk mendeskripsikan atau menggali secara luas mengenai bagaimana pola politik uang terjadi, faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dan bagaimana cara mengatasi politik uang di Kotamadya Sabang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, karena peneliti ingin mendeskripsikan suatu realitas/ gejala/ fenomena kontemporer masalah politik uang (*money politic*) di Kotamadya Sabang, dengan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah

yaitu empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi tempat penelitian adalah Kotamadya Sabang.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kotamadya Sabang yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2014. Sampel penelitian ini adalah representatif dari populasi yang diperoleh mengikuti teknik penarikan sampel (*sampling method*).

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Untuk menjamin representasi sampel dalam penelitian ini, dilakukan teknik pengambilan sampel dengan cara 3 (tiga) tahap. Tahap pertama *Stratified sampling* (pengambilan sampel berstrata) untuk menentukan kecamatan, tahap kedua *systematic sampling* (pengambilan sampel secara sistematis) untuk menentukan desa tempat sampel di ambil dan *random sampling* (pengambilan sampel secara acak) untuk menentukan responden yaitu pemilih pada pemilu tahun 2014.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu survei dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner. Prosesnya adalah pengumpulan data dengan menggunakan lembaran pertanyaan melalui kuesioner, kemudian responden menjawab atau mengisi kuesioner tersebut dengan mengikuti panduan dari surveyor yang sudah dilatih.

### **Teknik Analisa Data**

Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah data kuantitatif dengan jenis skala pengukuran ordinal dan nominal, sehingga teknik analisa data yang diterapkan adalah analisis deskriptif dan analisis eksploratif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: *Pertama*, validasi dan reduksi data. Pada tahapan ini, data yang diperoleh melalui kuesioner dilakukan

validasi dengan metode uji petik, yaitu peneliti mengontak responden secara acak untuk mengkonfirmasi kesahihan informasi yang diperoleh dari kuesioner, kemudian dilakukan reduksi data untuk meringkas data-data yang akan diolah dalam penelitian. *Kedua*; penilaian atau menganalisis data. Dalam tahap ini setelah peneliti mengumpulkan dan mendapatkan semua data yang mendukung atau membantu dan memang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis akan menelaah, kategorisasi, melakukan tabulasi data dan atau mengkombinasikan bukti untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Ketiga*, penyimpulan data yang diperoleh. Tahap ini adalah tahap terakhir pada penelitian ini. Dari hasil penilaian dan analisis yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan yang dapat lebih bermanfaat dalam memahami penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN

### Identifikasi Responden

#### 1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang dilakukan terkait dengan tingkat pendidikan responden lebih banyak berijazah SMA seperti yang terlihat pada gambar diatas. Ada 3% responden yang berpendidikan S2/S3, terdapat 21.6% responden berpendidikan D1/D2/D3/S1, Sedangkan berijazah SMU sederajat ada 57.3%, SLTP Sederajat sebanyak 9.5%, kemudian SD Sederajat ada 8.8% responden dan tidak sekolah 2.5%.

#### 2. Pekerjaan responden

Dilihat dari jenis pekerjaan responden ada 32% responden bekerja di swasta, 7% responden adalah pelajar/mahasiswa, 9% responden berprofesi sebagai pedagang, kemudian 12% responden berprofesi sebagai PNS dan ada 33% responden tidak menjawab dari pilihan jawaban yang tersedia.

#### 3. Pendapatan Responden per bulan

Dilihat dari tingkat pendapatan per bulan responden, pendapatan lebih dari Rp. 5 juta ada 0.3 responden, Rp. 3.1 juta s.d Rp. 5 juta ada 2.0% responden, kemudian yang berpenghasilan perbulan mulai Rp. 2 juta s.d 3 juta ada sebanyak 22.6% responden.

Dan dibawah 1.5 juta ada sebanyak 75.2% responden.

#### 4. Apakah anda terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2014?

Ketika ditanya kepada responden melalui angket yang diberikan, dengan pertanyaan apakah anda terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2014? Ada 98% responden menjawab terdaftar dan hanya 2% responden yang tidak terdaftar.

#### 5. Apakah anda menggunakan hak pilih pada pemilu 2014?

Kemudian ketika ditanya, apakah anda menggunakan hak pilih anda pada pemilu 2014, hasil survei diperoleh ada 90% responden menggunakan hak pilihnya dan hanya 10% responden yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu 2014.

#### 6. Alasan pemilih TIDAK menggunakan hak pilih pada pemilu 2014

Ketika ditanya alasan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014, hasil survei diperoleh 47% responden mengatakan lebih mementingkan pekerjaan, kemudian 2% responden mengatakan tidak percaya dengan peserta pemilu dan lebih mementingkan pekerjaan, ada 9% responden tidak percaya dengan peserta pemilu, dan ada 4% responden tidak percaya dengan partai politik dan peserta pemilu, ada 27% responden tidak percaya dengan partai politik dan ada 2% responden mengatakan tidak terdaftar dan tidak percaya dengan partai politik, serta ada 9% responden tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT).

## IDENTIFIKASI POLA TERJADINYA POLITIK UANG

#### 1. Menurut anda, Apakah ada peserta pemilu menggunakan uang atau bentuk lain dalam melakukan kampanye pada pemilu 2014?

Ketika ditanya dengan pertanyaan apakah ada peserta pemilu menggunakan uang atau bentuk lain dalam melakukan kampanye pada pemilu 2014, 35% responden mengatakan ada, 20% responden mengatakan tidak ada, 41% responden mengatakan tidak tahu dan 4% responden tidak menjawab.

2. Menurut anda, peserta pemilu menggunakan biaya kampanye untuk apa?

Keterangan:

Operasional kampanye adalah biaya perjalanan kampanye, pembuatan brosur, spanduk, dll

Politik uang adalah membayar pemilih, panitia pemilu, transaksi suara, dll

Ketika ditanya dengan pertanyaan untuk apakah peserta pemilu menggunakan biaya kampanye. Ada 7% responden tidak menjawab, kemudian ada 16% mengatakan untuk operasional kampanye dan politik uang, ada 11% responden mengatakan digunakan sebagai politik uang, dan 66% responden mengatakan untuk biaya operasional kampanye.

3. Menurut anda, bagaimana politik uang bisa terjadi?

Selanjutnya pertanyaan kepada responden, bagaimana politik uang bisa terjadi? Ada 51% responden mengatakan peserta pemilu dan tim kampanye menjanjikan uang kepada pemilih, 8% responden mengatakan pemilih menawarkan jasa dengan harapan diberikan imbalan/uang oleh peserta pemilu, 5% responden mengatakan penyelenggara pemilu bersedia melakukan kecurangan agar mendapat imbalan uang dari peserta pemilu, 10% responden mengatakan setuju point no 1 dan 2, selanjutnya ada 3% responden setuju dengan poin 1 dan 3, kemudian ada 1% responden mengatakan setuju dengan nomor 2 dan 3, 10% responden mengatakan tidak tahu dan 11% responden tidak menjawab.

4. Jika peserta pemilu atau timnya melakukan politik uang dengan cara menjanjikan uang kepada pemilih, maka polanya seperti apa?

Pertanyaan selanjutnya jika peserta pemilu atau timnya melakukan politik uang dengan cara menjanjikan uang kepada pemilih, maka polanya seperti apa?, ada 12% responden mengatakan mengundang tokoh masyarakat ke posko/kantor partai, ada 57% responden mengatakan berkunjung ke kelompok masyarakat secara terbuka/umum, ada 12% responden yang mengatakan melakukan serangan fajar, 2% responden mengatakan melakukan

“saweran” pada saat kampanye, ada 4% responden setuju dgn poin nomor 1 dan 2, ada 5% responden mengatakan setuju dengan poin 1 dan 3, ada 8% responden mengatakan setuju dengan nomor 2 dan 3 dan 1% responden menjawab setuju dengan poin 2 dan 4.

5. Politik uang terjadi dengan cara pemilih menawarkan jasa dengan harapan dapat uang/imbalan oleh peserta pemilu, maka polanya adalah?

Pertanyaan selanjutnya politik uang terjadi dengan cara pemilih menawarkan jasa dengan harapan dapat uang/imbalan oleh peserta pemilu, maka polanya adalah, ada 26.3% mengatakan kelompok pemilih menjanjikan sejumlah suara kepada peserta pemilu dengan harapan ada imbalan uang/jasa, ada 20.1% mengatakan pemilih meminta sejumlah uang agar mencoblos peserta pemilih, kemudian ada 18.0%, setuju dengan nomor 1 dan 2 dan ada 35.6% tidak tahu.

#### **IDENTIFIKASI FAKTOR TERJADINYA POLITIK UANG**

1. Menurut anda mengapa politik uang bisa terjadi pada pemilu?

Pertanyaan selanjutnya penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor terjadinya politik uang, dengan pertanyaan menurut anda mengapa politik uang bisa terjadi pada pemilu? 13% responden mengatakan tidak tahu, 27% responden menjawab peserta pemilu takut tidak terpilih, sehingga melakukan segala cara, termasuk politik uang, kemudian ada 16% responden mengatakan masyarakat tidak paham atas konsekuensi salah pilih, dan ada 45% responden mengatakan masyarakat sudah tidak percaya dengan peserta pemilu, sehingga menganggap siapapun yang terpilih sama saja.

2. Menurut anda, apakah kemiskinan mempengaruhi terjadinya politik uang?

Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut anda kemiskinan mempengaruhi terjadinya politik uang?, ada 56% responden mengatakan ya, dan 20% responden mengatakan tidak serta 24% responden mengatakan tidak tahu.

- Menurut anda apakah pengetahuan politik pemilih mempengaruhi terjadinya politik uang?

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah menurut anda pengetahuan politik pemilih mempengaruhi terjadinya politik uang? Ada 53% responden menjawab ya, 9% responden mengatakan tidak, dan 38% responden mengatakan tidak tahu.

Jika YA, apakah perlu pendidikan politik untuk pemilih?

Pertanyaan lanjutan dari pertanyaan diatas adalah jika Ya, apakah perlu pendidikan politik untuk pemilih? Ada 94% responden mengatakan perlu, dan hanya 6% responden mengatakan tidak perlu.

- Menurut anda, apakah faktor “Balas Budi” juga mempengaruhi terjadinya politik uang?

Pertanyaan selanjutnya adalah menurut anda apakah faktor “Balas Budi” juga mempengaruhi terjadinya politik uang? Ada 45% responden ya, ada 19% responden mengatakan tidak dan 36% responden mengatakan tidak tahu.

Jika YA, apakah boleh dilakukan?

Pertanyaan lanjutannya adalah jika Ya, apakah boleh dilakukan? 86% responden mengatakan tidak dan 14% responden mengatakan boleh.

- Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya politik uang?

Pertanyaan selanjutnya adalah adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya politik uang?, ada 91% responden mengatakan tidak ada dan hanya 9% responden yang mengatakan ada. Jika ADA, sebutkan?

No	Faktor-faktor lain yang mempengaruhi politik uang
1	Ikatan kontrak politik
2	Hubungan kerabat
4	Perilaku masyarakat materialistik
5	Caleg tidak mau bersaing dengan cara sehat/ tidak sportif

Pertanyaan lanjutannya adalah jika Ada, kemudian responden menjawab pertama ikatan kontrak, kedua hubungan

kerabat, ketiga perilaku masyarakat materialistik, dan keempat caleg tidak mau bersaing dengan cara sehat/tidak sportif.

## TAWARAN SOLUSI MENGATASI POLITIK UANG

- Menurut anda, apakah politik uang perlu diatasi?

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah politik uang itu perlu diatasi? Ada 82% responden mengatakan perlu, 6% responden mengatakan tidak perlu, dan 12% mengatakan tidak tahu.

- Menurut anda, siapakah yang paling bertanggung jawab mengatasi terjadinya politik uang pada pemilu?

Pertanyaan selanjutnya siapakah yang paling bertanggungjawab mengatasi terjadinya politik uang pada pemilu?, 43% responden mengatakan panwaslu, 10% responden mengatakan KPU/KIP, 16% responden mengatakan pemerintah, 16% responden mengatakan aparat penegak hukum, ada 6% responden mengatakan masyarakat, dan 10% mengatakan tidak tahu.

Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang berbentuk isian, artinya disini pertanyaan tidak disediakan jawabannya, responden sendiri yang mengisi jawabannya. Seperti dibawah ini:

## SIMPULAN

- Dari hasil survei yang dilakukan terkait dengan tingkat pendidikan responden lebih banyak berijazah SMA seperti yang terlihat pada gambar diatas. Kemudian dilihat dari jenis pekerjaan responden mayoritas berkerja di swasta. Dan pendapatan perbulan responden mayoritas dibawah 1.5 juta. Dan mayoritas responden terdaftar sebagai pemilih tetap dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014.
- Alasan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014, mengatakan lebih mementingkan pekerjaan, hanya sedikit yang tidak

- percaya sama calon legislatif dan partai politik.
3. Menurut responden peserta pemilu menggunakan uang atau bentuk lain dalam melakukan kampanye pada pemilu 2014, dan ada juga yang mengatakan tidak tahu.
  4. Peserta pemilu menggunakan dana tersebut untuk operasional kampanye dan politik uang. Penggunaan politik uang terjadi peserta pemilu dan tim kampanye menjanjikan uang kepada pemilih dengan cara peserta pemilu berkunjung ke kelompok masyarakat secara terbuka/umum.
  5. Politik uang terjadi dengan cara pemilih menawarkan jasa dengan harapan dapat uang/imbalan oleh peserta pemilu, maka polanya adalah kelompok pemilih menjanjikan sejumlah suara kepada peserta pemilu dengan harapan ada imbalan uang/jasa ada juga pemilih meminta sejumlah uang agar mencoblos peserta pemilu.
  6. Faktor terjadinya politik uang, dengan pertanyaan menurut anda mengapa politik uang bisa terjadi pada pemilu, masyarakat sudah tidak percaya dengan peserta pemilu, sehingga menganggap siapapun yang terpilih sama saja.
  7. Faktor kemiskinan sangat berpengaruh besar terjadinya politik uang. pengetahuan politik pemilih mempengaruhi terjadinya politik uang. Menurut responden perlunya pendidikan politik untuk pemilih.
  8. Faktor lain kenapa terjadi politik uang adalah disebabkan karena faktor balas budi. Sebenarnya faktor balas budi menurut responden tidak boleh dilakukan, karena tidak percaya terhadap peserta pemilu dan adanya faktor balas budi akhirnya hal itu terjadi.
  9. Faktor lain terjadinya politik uang adalah karena ikatan kontrak politik antara peserta pemilu dengan pemilih, hubungan kerabat, dan caleg tidak mau bersaing dengan cara sehat/tidak sportif.
  10. Pertanyaan lanjutannya adalah jika Ada, kemudian responden menjawab pertama ikatan kontrak, kedua hubungan kerabat, ketiga perilaku masyarakat materialistik, dan keempat caleg tidak mau bersaing dengan cara sehat/tidak sportif.
  11. Pemilih atau responden menyadari hal ini perlu diatasi dan menurut responden yang bertanggungjawab mengatasi politik uang pada pemilu adalah Panwaslu. Yang bisa dilakukan oleh panwaslu untuk mengatasi politik uang adalah melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu, meningkatkan kinerja anggota, dan merekrut anggota yang bersih. Memberikan sanksi tegas dan memblaclist terhadap yang bermain politik uang. Melakukan upaya monitoring secara khusus terhadap proses atau pelaksanaan pemilu serta menindaklanjuti temuan atau laporan dari masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran di lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya harus betul-betul mengawasi dengan baik. Melaporkan segala penyelewengan kepada yang berwajib. Anggota panwaslu harus semua dari partai. Anggota panwaslu harus betul-betul pro-rakyat. Di dalam pelaksanaan pemilu melihat dengan seksama hasil pemilu tersebut. Kemudian mengawasi dengan teliti dan peka bila ada laporan dari siapapun. Badan pengawas harus meletakkan orang-orang di setiap TPS. Pawaslu sendiri juga jangan bermain api. Gencar melakukan pengawasan di lapangan dan menambah personil. Harus melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada setiap calon. Mengawasi dan membangun kerja sama yang baikbersama aparat yang ada dapat lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti.

Mengawasi setiap apa yang dilakukan peserta Pemilu. Perlu merekrut petugas pengawas yang benar-benar jujur dan Sanksi pelanggaran harus tegas dan sesuai peraturan. Perlu merekrut petugas pengawas yang benar-benar jujur dan Perlu merekrut petugas pengawas yang benar-benar jujur dan Menempatkan petugas dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan. Tidak memihak kepada pihak tertentu.

12. Untuk mengatasi politik uang, yang dapat dilakukan oleh KPU/KIP adalah Meningkatkan kinerja anggota, dan merekrut anggota yang bersih. Memberi sanksi tegas dan memblacklist terhadap parpol, caleg dan Melakukan upaya monitoring secara khusus terhadap proses atau tahapan pelaksanaan Pemilu serta menindaklanjuti temuan atau laporan dari masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran di lapangan. Menempatkan petugas dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tidak boleh memihak kepada pihak tertentu. Turun kelapangan. Tindak tegas dan harus diberi sanksi yang sesuai.
13. Yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi politik uang adalah Membuat UU tentang sanksi politik uang. Sosialisasi Pemilu terhadap masyarakat. Pemerintah aktif mengawasi jalannya Pemilu. Fasilitas yang digunakan dalam Pemilu yang betul-betul aman. Penguatan peraturan pemerintah. Pemberian hukuman kepada yang terbukti melakukan kecurangan, harus tegas dan keras. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang aturan dan hukumannya. Pemerintah harus menindak tegas orang-orang yang melakukan politik uang. Pemerintah harus mengawasi Pemilu lebih ketat.

Sosialisasi pemahaman akibat salah pilih. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pengertian Pemilu dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Memperbaiki kehidupan masyarakat agar hidupnya tidak di bawah garis kemiskinan dan memberikan penyuluhan bahwa politik uang adalah perbuatan dosa. Membuat peraturan yang jelas tentang sanksi. Pemerintah harus aktif dalam penyelenggaraan harus tindak tegas bila kedapatan politik uang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Alexander, Herbert E, *Financing Politics, Politik uang dalam Pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*, (Terj). Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Ducan, Hugh Dalziel, *Sosiologi Uang*, Terj. 1997.
- Garna. Judistira, *Ilmu-ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi*, Bandung : Primako Akademika, 2001.
- Ismawa, Indra, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Problematika dan Kebutuhan Membangun Fiqih Anti Korupsi* dalam Burhan A.S, Waidl, Bandi Ismail (edt), *Korupsi di Negara Kaum Beragama*, Jakarta: P3M, 2004.
- Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Piliang, Indra J., *Korupsi dan Demokrasi*, Kompas, 5 November 2001.
- Umam, Ahmad Khoirul, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006.